Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam
Volume 22 Nomor 2 Tahun 2024
Print ISSN : 1693-0576
Online ISSN : 2540-7783

RELASI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN KEKUASAAN NEGARA PADA MASA ORDE BARU DALAM PANDANGAN LOUIS ALTHUSSER

Dendy Wahyu Anugrah[1], Muhammad Endy Fadlullah[2]
[1]Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
[2]Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia
e-mail: [1]Dendywahyu291@gmail.com, [2]Endy@iaiibrahimy.ac.id

Abstract

Since its establishment, the Indonesian Council of Ulama (MUI) has a very significant role in the life of Indonesian society, especially for Muslims. Through two media that are always presented, namely fatwa (legal result) and discourse, MUI's existence is authoritative in the spectrum of Islamic religion in Indonesia. Historically, MUI is faced with the political situation that occurred during the New Order era. The relationship between MUI and the New Order government needs to be traced and analysed further in order to provide a holistic understanding. To analyse and know how the relation between MUI and state power during the New Order, this research is based on the thought of a contemporary French philosopher, Louis Althusser with his concept of ideology. The method in this research uses library research related to the object of research. Finally, this research shows that the relationship between MUI and the state during the New Order era was political. As a religious (Islamic) institution, MUI was used as one of the ideological tools of the state to legitimise the political interests of power. As stated by Althusser, that religious institution is one of the ideological instruments of the state to control the society that is often not realised by the society itself.

Keywords: *Indonesian Council of Ulama, State, New Order, Louis Althusser*

Abstrak

Sejak berdirinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Melalui dua media yang selalu dihadirkan, yakni fatwa (hasil hukum) dan wacana, eksistensi MUI bersifat otoritatif dalam spektrum keagamaan Islam di Indonesia. Secara historis, MUI dihadapkan pada situasi politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Relasi antara MUI dengan pemerintah Orde Baru perlu ditelusuri dan dianalisis lebih jauh agar memberikan pemahaman yang holistik. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana relasi antara MUI dan kekuasaan negara pada masa Orde Baru tersebut, penelitian ini mendasarkan pada pemikiran seorang filsuf Prancis kontemporer, yakni Louis Althusser dengan konsep ideologinya. Metode pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan objek penelitian. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan, bahwa relasi antara

MUI dan negara pada masa Orde Baru berjalan secara politis. Sebagai institusi agama (Islam), MUI dijadikan sebagai salah satu alat ideologis negara untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan politis kekuasaan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Althusser, bahwa institusi agama adalah salah satu instrumen ideologis dari negara untuk mengontrol masyarakat yang sering kali tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: *Majelis Ulama Indonesia, Negara, Orde Baru, Louis Althusser*

Accepted:	Reviewed:	Published:
May, 28 2024	October, 24 2024	October, 31 2024

A. Pendahuluan

Eksistensi sebuah agama memiliki peranan yang sangat penting kepada manusia untuk memahami, menikmati, dan sebagai entitas yang memberikan makna spiritual dalam kehidupan. Setiap manusia dengan sadar dan penuh keyakinan untuk memeluk agamanya masing-masing dengan bersedia untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama. Menurut Leuba (1868-1946), agama merupakan keselarasan dan memberikan kedamaian dengan kekuatan-kekuatan yang diyakini bisa mengarahkan dan mengontrol perjalanan alam dan kehidupan manusia (Syaifudin, 2019).

Bahkan manusia sejak lahir sudah beragama. Secara eksplisit Joachim Wach (1898-1955) berpandangan, bahwa manusia sejak lahir membawa agama. Hal ini menandakan mengenai bagaimana agama menjadi entitas yang sangat diperlukan oleh manusia. Sebab, setiap manusia membutuhkan sebuah pegangan, baik yang bersifat material maupun spiritual, yang dapat menuntun mereka dan memberikan pemahaman atas problematika yang dihadapi. Dalam konteks sosiologis, agama tidak hanya dipandang sebagai doktrin ideologis yang bersifat abstrak, akan tetapi agama muncul dalam kehidupan sehari-hari. Agama dipandang sebagai bagian penting dari pranata kebudayaan (L. R. Rustandi, 2020).

Secara evolutif, keberagamaan manusia tidak dapat terlepas dari konteks sosio-polik dan kebudayaan. Sehingga, agama berjalan beriringan dengan keadaan sosial, politik, dan kebudayaan dalam masyarakat. Agama juga mampu melakukan refleksi atas persoalan sosial, politik, dan kebudayaan yang dapat dikaji secara komprehensif. Lebih jauh, secara historis, agama merupakan pranata pewarisan makna-makna yang ditelaah dari generasi ke generasi, sehingga makna agama dapat dikembangkan sesuai dengan konteks zaman (N. Rustandi & Wibisono, 2020).

Perihal signifikansi ajaran suatu agama juga terjadi di Indonesia. Dengan heterogenitas etnis, bahasa, dan pandangan hidup (*Worldview*) memposisikan

agama sebagai sesuatu yang cukup sentral dan fundamental. Melalui fleksibilitas agama, masyarakat Indonesia dapat menerima ajaran agama dengan secara terbuka. Kedatangan agama Islam, misalnya. Meski Indonesia bukan negara Islam (atau negara-agama), namun kuantitas pemeluk agama Islam (Muslim) di Indonesia sangat besar (Mustofa et al., 2022). Hal tersebut merupakan indikasi bahwa agama Islam datang sangat harmoni dengan konteks sosial, politik, dan kebudayaan masyarakat Nusantara (Indonesia) pada saat itu.

Meski Islam mendapatkan atensi yang baik dari masyarakat Indonesia, bukan berarti keberadaannya terlepas dari pergolakan politik pada masa-masa tertentu. Relasi negara (kekuasaan) dan agama, khususnya Islam, di Indonesia sering kali berada dalam ketegangan dan pasang surut seiring pergolakan politik yang ada. Pada masa awal kemerdekaan, usaha mendamaikan Islam, Nasionalisme, dan Komunisme yang dibesut oleh Soekarno dalam Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom) akhirnya memicu konflik yang berkepanjangan. Di masa Orde Baru, pancasila sebagai asas tunggal memunculkan ketegangan politik, karena rigoritas dan mobilisasi yang dijalankan oleh kekuasaan. Sehingga umat Islam, ditandai dari beberapa pandangan organisasi Islam, berbeda pendapat. Dan akhirnya negara melakukan pembentukan lembaga-lembaga hingga partai politik. Sedangkan setelah Reformasi beragam tindakan separatis, terorisme, dan fundamentalisme Islam berusaha meruntuhkan Pancasila yang dianggap sebagai sebuah manifestasi kekufuran (Saputra, 2023).

Berkenaan dengan diskursus agama dan kekuasaan, seorang tokoh Marxis asal Prancis, yakni Louis Althusser (1918-1990) menganalisis secara teoritis tentang relasi agama dan kekuasaan. Bermula dari pemikiran perihal ideologi yang bertolak pada pandangan Karl Marx (1818-1883), Althusser fokus pada dua hal: *pertama*, bagaimana tatanan politik atau wacana dari penguasa dipaksakan ke seluruh elemen masyarakat; dan *kedua*, bagaimana peranan ideologi dalam kehidupan individu manusia (Althusser, 1971).

Ideologi, bagi Althusser, adalah ilusi yang dipandang sebagai sesuatu yang nyata atau kenyataan. Secara sederhana Althusser ingin memahami bagaimana ideologi tercipta, sehingga diyakini kebanyakan orang, namun secara bersamaan ideologi tersebut menciptakan penindasan baru kepada manusia. Meskipun ideologi dianggap sebagai ilusi, akan tetapi ia dapat dilihat dan dipahami sebagai inti dari kekuasaan politik (Wattimena, 2019). Setiap kekuasaan, dalam konteks ini ialah negara, niscaya memiliki ideologi. Dan akhirnya ideologi tersebut menyebar ke seluruh elemen masyarakat dengan berbagai instrumen politik.

Dari pembahasan relasi antara agama dan kekuasaan (negara) di atas, perlu sebuah analisis teoritis yang berusaha menampakkan sesuatu yang masih terlihat

samar. Sejauh ini, penelitian yang telah dilakukan hanya fokus pada peran legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam kontestasi politik Islam mutakhir (Baihaqi, 2019), dan arah politik serta pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkenaan dengan relasi agama dan negara (Mahdi & Ayu, 2023). Atau, penelitian yang berusaha membaca Islam Indonesia di masa Orde Baru secara umum (Johansyah, 2018).

Dari penelitian yang telah dikemukakan, belum ada yang fokus membahas relasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kekuasaan negara pada masa Orde Baru dengan pendekatan filosofis. Sehingga penelitian ini akan membahas bagaimana hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga agama dengan kekuasaan di masa Orde Baru. Kemudian, dianalisis secara deskriptif menggunakan kerangka epistemik Louis Althusser untuk memberikan gambaran mengenai posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru. Penelitian ini menarik dikaji, sebab konklusi yang dihadirkan akan memberikan bahan kajian lebih lanjut mengenai relasi agama dan kekuasaan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis. Sumber-sumber penelitian ini meliputi jurnal, buku, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Zed (2008) studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Setelah referensi dikumpulkan, akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan pemikiran filosofis. Dalam hal ini objek penelitian ialah tentang hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kekuasaan (negara) pada masa Orde Baru. Sedangkan untuk menganalisis objek penelitian tersebut akan menggunakan pemikiran filosofis Louis Althusser yang didasarkan pada karyanya yang berjudul *Ideology and Ideological State Apparatuses: Notes Towards an Investigation* (1971).

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks agama dan kekuasaan (negara), sebenarnya pembahasan mengenai keduanya sangatlah kompleks. Pertautan yang melatarbelakangi antara agama dan negara, tidak berjalan begitu saja tanpa sebab yang jelas. Sebagai entitas yang saling terkait, keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan berbagai peranti ideologis dan praktis yang mampu dipertemukan. Namun tak jarang, keberadaan agama atau lembaga agama justru

dijadikan instrumen politik oleh kekuasaan yang bertujuan untuk meenghegemoni masyarakat, secara kolektif maupun individu.

Maka dari itu perlu sebuah analisis yang dapat mendedah praktik politik kekuasaan dengan melihat sebuah hubungannya dengan agama atau lembaga agama. Entah lembaga tersebut dibentuk oleh kekuasaan, atau memang sudah ada sejak awal berdirinya sebuah negara secara otonom sehingga akhirnya lembaga agama tersebut terhegemoni oleh otoritas negara. Dalam penelitian ini, yang dimaksud lembaga agama ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan kekuasaan mengacu pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dalam tahun-tahun tertentu.

Sebelum membahas lebih jauh bagaimana hubungan keduanya, perlu kiranya untuk menampilkan terlebih dulu profil singkat, konsep-konsep dasar, dan kritik atas kerangka epistemik Althusser.

1. Profil dan Latar Belakang Intelektual Louis Althusser

Louis Althusser lahir bulan Oktober di Birmandreis, Aljazair, pada tahun 1918. Ia adalah seorang filsuf aliran Marxis yang terkemuka di Prancis. Di masa kecilnya, ia duduk di bangku sekolah dasar di Aljazair, dan pada usia remaja, tepatnya pada saat sekolah menengah, ia mengenyam pendidikan di Marseille, Prancis. Kemudian ia melanjutkan di *Lyon* untuk persiapan bagi *concours* yang memungkinkan masuk ke *Ecole Normale Superieure*. Pada saat menjadi pelajar, ia juga aktif dalam *Jeunes Etudiants Catholicques* (himpunan pelajar Katolik) (Yunus, 2019).

Tak lama setelah Althusser diterima di *Ecole Normale Superieure* pada tahun 1939, ia diharuskan untuk mengikuti wajib militer Prancis dan akhirnya diikutsertakan dalam pertempuran pada awal Perang Dunia II di Jerman. Karena situasi politik Perang Dunia II yang sangat mencekam, pada tahun 1940 Althusser menjadi tahanan perang hingga Perang Dunia II selesai pada 1945. Saat tahun-tahun di dalam tahanan, Althusser diperkenalkan pada dimensi kehidupan yang sebelumnya belum pernah ia jumpai (Bertens, 2019).

Althusser bercerita, dalam sebuah wawancara tahun 1968, bahwa selama dalam tahanan ia bertemu dan menjalin hubungan intens dengan para buruh, petani, dan aktivis komunis. Ketika kembali ke Prancis, Althusser melanjutkan studinya di *Ecole Normale Superieure*, dan mendapatkan *Agregation de Philosophie* pada tahun 1948. Di tahun yang sama pula ia menjadi anggota Partai Komunis Prancis (PCF). Selanjutnya Althusser memperoleh gelar *Docteur es Lettres* dengan tema tesis besar hubungan filsafat dan politik Prancis abad ke-18 sekaligus tesis kecil tentang JJ. Rousseau. Di almamater-nya, *Ecole Normale Superieure*, ia diangkat

menjadi *maitre-assistent*, dosen filsafat, dan untuk beberapa saat bertugas sebagai sekretaris (Bertens, 2019).

Karena dia aktif dalam Partai Komunis Prancis (*Parti Communite Francais*), sudah barang tentu sebagian besar pemikirannya, terutama mengenai Marxisme, ditujukan untuk persoalan yang dihadapi dalam internal partai. Hal itu dibuktikan dengan *magnum opus*-nya yang bertajuk *For Marx* (Prancis: *Pour Marx*). Buku ini ditulis pada tahun 1965 oleh Althusser karena keresahannya atas pembiasan atau penyelewengan prinsip partai komunis di Prancis dari Marxisme. Bagi Althusser, Marxisme harus terpisah dari ideologi. Sains (ilmu pengetahuan) lebih dulu daripada ideologi, sehingga tidak akan mungkin ada istilah sains dalam ideologi proletar maupun borjuis (Romadona, 2020).

Kemudian setelah peristiwa meninggalnya pemimpin Uni Soviet, yakni Joseph Stalin pada tahun 1955, Althusser memberikan respon intelektualnya terhadap penyelewengan Stalin yang menjadi perdebatan hangat di kalangan partai komunis seluruh Eropa. Bahkan, sampai dicetuskannya wacana "de-Stalinisasi" guna mengembalikan jalur politik partai komunis. Akan tetapi wacana tersebut, bagi Althusser, justru mengakibatkan pembelokan prinsip Marxisme ke arah liberal. Partai Komunis Prancis setidaknya telah mengurangi sikap militansi dalam pergerakan politik kala itu. Mereka mulai mengikuti pemilihan elektoral di Prancis dan cenderung bersikap moderat. Semua itu dilakukan atas dasar wacana "de-Stalinisasi" yang menghendaki partai komunis memiliki wajah humanis (Romadona, 2020).

Kehendak partai tersebut didukung oleh banyak pemikir Marxis, terutama mereka yang beraliansi dengan Mazhab Frankfurt, Jerman. Karena faktor inilah kemudian Althusser mengkaji secara komprehensif pemikiran Marx dan melahirkan konsep pemikiran Marx yang terbagi menjadi: Marx muda dan tua. Namun, kendati Althusser berada dalam pijakan Marxis, pemikirannya jauh melampaui Marxisme ideologis. Marx diposisikan oleh Althusser sebagai seorang saintis yang bertolak pada objetivitas. Ia juga pemikir yang membela sains sebagai pengetahuan konkret. Sesuai analisis Althusser, perkembangan sains sering kali terhambat. Hal tersebut disebabkan oleh kompleksitas situasi dan kondisi masyarakat. Sebab, menurut Althusser, setiap sejarah masyarakat tertentu mengandung sebuah ideologi. Dari sanalah muncul konsepsi atas ideologi yang menghambat laju sains itu sendiri. Sehingga, tugas sains ialah melakukan distansiasi semaksimal mungkin terhadap ideologi, karena bagaimanapun masyarakat tidak akan pernah dapat sepenuhnya lepas dari ideologi (Suryajaya, 2009).

Buih-buih pemikiran Althusser sangat berpengaruh ke dalam khazanah pemikiran Kiri kontemporer. Di Inggris terdapat nama Alex Callinicos dan Roy

Bhaskar yang mengaku terpengaruh oleh Althusser, demikian juga dengan Ernesto Laclau dan Chantall Mouffe yang berpijak pada konsep Althusserian mengenai "overdeterminasi" dan membangun paradigma pasca-Marxisme. Sedangkan di Prancis, sederet pemikir sekaliber Etienne Balibar, Jacques Ranciere, dan Alain Badiou (dalam bidang filsafat), Pierre Macherey (dalam kritik sastra), Maurice Godelier (dalam bidang antropologi), dan Nicos Poulantzas (dalam bidang sosiologi). Selanjutnya dalam bidang ekonomi-politik, terdapat Stephen Resnick dan Richard Wolff di Amerika Srikat, John Milios, Dimitri Dimoulis, dan George Economakis di Yunani, serta Jacques Bidet di Prancis (Althusser, 2015).

Lebih jauh, ide-ide Althusser juga terus dikembangkan melalui jurnal *Rethingking Marxism* dan *Decalages*. Pada masa ini, hampir di seluruh penjuru pemikiran Kiri, jejak-jejak pemikiran Althusser terlihat secara eksplisit. Oleh sebab itu, mempelajari pemikiran Althusser merupakan gerbang untuk memasuki khazanah pemikiran Kiri kontemporer.

Sebagai seorang pemikir, ia juga sangat produktif dalam menulis. Berbagai karya Althusser, antara lain: *Montesquieu, La Politique et L'histoire* (Montesquieu, Politik, dan Sejarah), 1959; *Manifestes Philosophiques de Feuerbach* (Manifest-Manifesto Filosofis Feuerbach), 1960; *Pour Marx* (Indonesia: Untuk Marx, Inggris: *For Marx*), 1965; *Lire "Le Capital"* (Membaca Das Kapital), 1965; *Lenine et La Philosophie* (Lenin dan Filsafat), 1968; *Reponse a John Lewis* (Jawaban kepada John Lewis), 1973; *Philosophie et Philosophie Spontanee des Savant* (Filsafat dan Filsafat Spontan dari Para Sarjana), 1974; *Elements d'Autocritique* (Sekelumit Kritik-Diri), 1974; *Positions* (Posisi-Posisi), 1976; *Ce que ne Peut Plus Durer Dans le Parti Communite* (Apa yang Tidak Boleh Berlangsung Terus dalam Partai Komunis), 1978 (Bertens, 2019).

Kendati pemikiran Althusser sangat berpengaruh di masanya, bukan berarti konstruksi pemikirannya tidak dihadapkan pada kritik para filsuf sezaman dan setelahnya. Pada akhir 1970-an, pandangan Althusser dikritik oleh para pemikir dalam beberapa cara. Seperti yang dilakukan oleh Pusat Kajian Budaya Media Kontemporer di Birmingham yang dipimpin oleh Stuart Hall. Dalam kritiknya, Hall menolak pandangan Althusser mengenai potensi untuk melawan pesan ideologis yang disajikan kepada subjek. Sebab, dalam studi budaya, subjek atau seseorang memiliki kemampuan untuk menolak pesan media (Ramah, 2019).

Selain itu, kritik juga dilayangkan, setidaknya, oleh Ernesto Laclau dan Chantall Mouffe yang menolak teori Althusser bahwa subjek dikendalikan oleh satu ideologi bagi semua wacana. Karena, subjek tidak diinterpelasi hanya dalam satu posisi subjek: wacana yang berbeda memberikan (atau membuat) subjek yang berbeda pula, dan bisa jadi bertentangan dari sudut posisi berbicara. Selanjutnya,

konsep ideologi Althusser dikritik oleh Michel Foucault. Menurut Foucault, sebuah kebenaran, subjek, dan relasi antarsubjek diciptakan dalam wacana, dan tidak ada potensi berada di belakang wacana menuju kebenaran yang sesungguhnya. Sebab itulah Foucault tidak memerlukan konsep ideologi (Ramah, 2019).

Sejak tahun 1960-an, Althusser sering dibawa ke klinik psikiatris karena gangguan kejiwaan. Pada bulan November 1980 terdapat peristiwa yang sangat tragis yakni, Althusser melakukan suatu pembunuhan terhadap perempuan yang bernama Helene Rytmann-Legotien yang tak lain adalah istrinya sendiri. Setelah peristiwa itu, Althusser dikirim ke Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani rehabilitasi. Saat merampungkan masa rehabilitasi tersebut, Althusser membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam sebuah acara TV di Italia, Althusser menandaskan bahwa dirinya bukan seorang Marxis, melainkan seorang "Sosial Anarkis". Pernyataan tersebut cukup mengejutkan publik saat itu (Romadona, 2020). Althusser meninggal pada tahun 1990.

2. Konsep Dasar Pemikiran Althusser

Setelah mengetahui latar belakang intelektual Althusser, perlu memaparkan berbagai konsep-konsep kunci (*key concepts*) pemikirannya yang nantinya akan digunakan sebagai alat analisis penelitian ini. Beberapa konsep kunci tersebut, antara lain: perpecahan atau keretakan epistemologis (*epistemological break*) basis dan superstruktur (*base and superstructure*), overdeterminasi (*overdetermination*), ideologi (*ideology*), Aparatus Ideologi Negara (*Ideological State Aparatuses*) dan Aparatus Represif Negara (*Repressive State Aparatuses*), praktik (*practice*), dan interpelasi (*interpellation*). Berbagai konsep kunci tersebut akan dikemukakan dalam bagian ini dengan meletakkannya pada beberapa sub-bab.

Konsep kunci yang telah disebutkan di atas tidak bersifat independen, atau berjalan tanpa saling berkaitan satu sama lain. Dalam pemikiran Althusser, konsep kunci (*key concept*) tersebut berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian, konsep dasar pemikiran Louis Althusser dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keretakan Epistemologis (*The epistemological break*)

Konsep ini berawal dari pembacaan Althusser terhadap pemikiran Marxisme klasik atau tradisional. Menurut Althusser, pemikiran Marx terdapat keretakan epistemologis (istilah datang dari filsuf ilmu pengetahuan asal Prancis, Gaston Bachelard). Keretakan epistemologis tersebut berlangsung sekitar tahun 1845-1850, oleh karenanya Althusser mengklasifikasi karya-karya Marx; ketika Marx masih muda dan Marx saat pemikirannya sudah matang atau disebut sebagai Marx tua (Jusuf, 2017).

Suatu pengetahuan disebut baru, jika pengetahuan tersebut berhasil merumuskan problem yang tengah dihadapi, dan saat problem yang hendak

diselesaikan mengalami perubahan, maka terjadilah keretakan atau patahan epistemologis. Althusser menolak seluruh pemahaman mengenai pemikiran Marx yang cenderung disalahpahami, yakni pemikiran Marx bersifat humanistik-teoritis dan ekonomi-deterministik. Dengan pembacaan atas karya-karya Marx, Althusser menyatakan bahwa dalam karir intelektual Marx ternyata terdapat keretakan epistemologis yang mengubah proyek intelektual Marx (Syawaludin, 2017).

Pada fase awal, pemikiran Marx masih bersifat humanis dan terpengaruh oleh Feuerbach. Dalam fase ini sering kali Marx menggunakan konsep-konsep seperti: subjek, kodrat manusia, alienasi, dan sejarah. Sedangkan Marx pada fase "tua", menurut Althusser, pemikirannya lebih menghadirkan suatu pengolahan teknis berdasar ilmu ekonomi. Dalam fase ini, Marx sangat ilmiah. Menurut pembacaan Althusser, keretakan epistemologis (*epistemological break*) tersebut telah menyematkan pada diri Marx atas kemantapan pemikirannya sebagai teori ilmiah dengan indikator bahwa Marx telah menyingkirkan humanisme dalam pemikiran para filsuf pendahulunya, yakni Feuerbach dan Hegel (Kosat, 2019).

b. 0verdeterminasi (*Overdetermination*)

Dalam tiap-tiap pemikiran, niscaya akan terpengaruhi oleh pemikiran terdahulu maupun konteks yang ditemui. Demikian pula yang dialami oleh Althusser. Konstruksi pemikirannya tidak dapat terlepas dari konteks gerakan Kiri di Prancis dan Eropa pada abad ke-20. Ia pun mengatakan, dalam kata pengantar edisi bahasa Inggris buku *Pour Marx* (1965), bahwa pemikirannya merupakan "intervensi di dalam konjungtur tertentu". Maksud dari konjungtur tersebut ialah proses "*de-Stalinisasi*" yang digalakkan sejak Kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-20 pada tahun 1956 sampai perpecahan antara Cina dan Soviet (1960-1963) (Althusser, 2015).

Pada saat pergulatan tentang dogmatisme Stalinis dan kritik Kanan atas dogmatisme tersebut (argumentasi humanis dalam proses de-Stalinisasi), Althusser berusaha mencari jalan ketiga. Dalam upaya tersebut, Althusser hendak melampaui keduanya dengan mengakui "otonomi relatif" superstruktur di atas basis sekaligus determinasi pada pokok terakhir. Berarti ia mengakui, bahwa ideologi mempunyai koherensi internal dan logikanya sendiri. Hal tersebut tidak bisa sepenuhnya direduksi kepada mekanisme ekonomis, dan juga dapat mempengaruhi mekanisme tersebut (overdeterminasi). Meski demikian, mekanisme ekonomis, menurut Althusser, tetap memiliki pengaruh (Althusser, 2015). Atau dengan bahasa lain, Althusser berargumentasi bahwa hubungan basis dan super-struktur tersebut bersifat otonomi relatif, dan keduanya memiliki kesalinghubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain (Syawaludin, 2017).

Menurut Althusser ada tiga tingkatan dalam struktur kelas, antara lain: *ekonomi*, *politik*, dan *ideologi*. Ketiga tingkatan atau level tersebut mencakup sebagian besar aspek dalam kehidupan manusia. Ekonomi melingkupi semua aspek produksi yang bersifat materil. Politik mencakup semua bentuk pengorganisasian, sedangkan ideologi meliputi segala macam gagasan dan keyakinan. Bagi Althusser, tingkatan politik dan ideologi memiliki "otonomi relatif" (Jones et al., 2016).

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa reproduksi "hubungan-hubungan" produksi memiliki acuan pada aspek-aspek praktik ideologi dan politik. Pemahaman ini merupakan kritik Althusser terhadap teori Marx tentang ketidakseimbangan dua entitas (kekuatan dan hubungan produksi) dapat menyebabkan penyesuaian kompensasi pada tingkat lain. Menurut Althusser, kontradiksi antara kekuatan dan hubungan produksi (mungkin) diperlukan, namun tidak cukup untuk melahirkan revolusi. Dalam Revolusi Rusia, misalnya. Kelahiran revolusi di Rusia, tidak dapat dilihat hanya akibat dari aspek kontradiksi besar atau universal belaka. Masing-masing memiliki kontradiksi dalam sosio-politik tertentu dan tingkat struktural yang berbeda (Suharso, 2015).

Perubahan dalam struktur sosial, menurut Althusser, disebabkan oleh berbagai kontradiksi. Atau, apa yang disebut Althusser sebagai "overdeterminasi". Sederhananya, overdeterminasi merupakan hubungan atau entitas yang saling kebergantungan satu sama lain. Perihal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pemikiran Althusser mengenai ideologi.

c. Ideologi (*Ideology*)

Penolakan Althusser terhadap pemikiran Marxis klasik tidak hanya berhenti pada wilayah basis dan superstruktur belaka. Althusser, dengan karakteristik strukturalis (Althusser biasa digolongkan dalam "Marxisme Strukturalis") (Kosat, 2019), membaca para pendahulu dengan sikap optimistis. Hal yang kemudian ia tidak sependapat dengan para Marxis klasik ialah mengenai ideologi. Menurut Althusser, ideologi bukanlah "kesadaran palsu", sebagaimana dikonsepsikan oleh Marx, melainkan sebagai suatu ketidaksadaran yang mendalam (*profoundly unconciuous*) (Ghazalba, 2020). Dan, ideologi juga mempunyai kekuatan untuk menjadi faktor yang membentuk atau membangun masyarakat, seperti halnya basis ekonomi.

Ideologi merupakan segala yang telah tertanam (secara mendalam) di dalam diri tiap-tiap individu. Sehingga, setiap manusia tidak akan pernah dapat terlepas dari ideologi dalam struktur sosial masyarakat tertentu. Dalam analisis Althusser, hubungan subjek dengan ideologi sangat erat. Individu akan menjadi subjek ideologis melalui proses interpelasi. Teori interpelasi ideologi ini, adalah suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana subjek diterjemahkan oleh

ideologi melalui proses sosialisasi dari suatu masyarakat. Secara sederhana, dalam teori interpelasi Althusser, individu senantiasa dipandu, dibimbing, dan diarahkan oleh ideologi di sekeliling mereka, baik itu disadari atau tidak, dan peran sosialisasi sangat berpengaruh dalam menentukan perilaku individu suatu masyarakat (Mubarak, 2023).

Kendati ideologi dalam suatu masyarakat berbeda satu sama lain, di sisi lain ideologi juga ditunjang oleh relasi sosial yang bersifat konfliktual. Ideologi kaum borjuis, misalnya, saat melakukan ekspansi kekuasaannya ke wilayah lain, maka yang akan terjadi ideologi kaum borjuis mendominasi ideologi yang lain. Dalam konteks dominasi antar-ideologi tersebut, Althusser memberikan pemaparan mengenai bagaimana cara kelas tertentu menguasai kelas yang lain melalui dua cara: *pertama*, Aparatus Ideologi Negara (*Ideological State Apparatus*, ISA) dan *kedua*, Aparatus Represif Negara (*Repressive State Apparatus*, RSA). Secara umum, RSA bekerja dalam spektrum yang bersifat fisik, atau mampu melakukan kekerasan. Misalnya, institusi polisi, pengadilan, militer, dan bahkan kelompok preman. Sedangkan ISA bekerja dengan melakukan manipulasi-manipulasi terhadap kesadaran masyarakat, serta berada di dalam atau di luar kekuasaan. ISA ini, juga disebut sebagai "ideologi" (Fathurokhmah, 2018).

Praktik ISA yang dilakukan oleh kekuasaan (negara) berjalan secara efektif karena eksistensinya cenderung tidak disadari oleh masyarakat, bahkan praktik simbolik dituangkan dalam buku, dogma, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya. Pergerakan ISA dalam sebuah masyarakat bersifat subtil. Althusser dalam *Ideology and Ideological State Appratuses* (1971) menyebutkan, bahwa ISA dapat dilihat dalam hal berikut:

1) ISA agama (perbedaan sistem gereja);
2) ISA pendidikan (perbedaan sistem sekolah negeri dan swasta);
3) ISA keluarga;
4) ISA hukum;
5) ISA politik;
6) ISA Serikat Buruh;
7) ISA komunikasi (pers, radio, televisi, dan lain-lain);
8) ISA budaya (Althusser, 1971).

Secara eksplisit, pandangan Althusser mengenai ideologi dapat dipahami dalam lima konsep, antara lain: *pertama*, ideologi bertendensi pada pelembagaan gagasan secara sistematik yang diartikulasikan oleh masyarakat tertentu; *kedua*, ideologi dipandang sebagai alat manipulasi; *ketiga*, ideologi akhirnya dapat memobilisasi massa; *keempat*, disposisi ideologi menjadi pelembagaan ide dan sebagai praktik materil; *kelima*, ideologi memainkan peranan yang subtil, sehingga

sering kali keberadaannya tidak disadari dalam kehidupan sebuah masyarakat (Syawaludin, 2017).

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada Masa Orde Baru

Sepanjang sejarah Indonesia, terdapat berbagai polemik yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat Indonesia. Agama dan kekuasaan (negara) mempunyai relasi yang sangat erat dalam spektrum politik. Relasi yang terjalin antara keduanya sering kali mengalami pasang surut yang dilandasi oleh dinamika politik tanah air (Saputra, 2023). Pada masa Orde Baru (Orba), hubungan agama (institusi agama), khususnya Islam, dengan kekuasaan dapat dilihat pada pembentukan sebuah institusi keagamaan Isalm, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi yang di dalamnya terhimpun berbagai ulama dan cendekiawan Muslim dengan tujuan untuk menjembatani problematika umat Islam dan pemerintah (Saputra, 2023). Secara definitif, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi semi pemerintah di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberikan saran dan fatwa perihal agama maupun persoalan kebangsaan kepada pemerintah dan masyarakat. Eksistensi MUI juga ikut serta dalam mengkampanyekan persatuan umat Islam, dan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat (As'ad, 2010).

Secara historis, pembentukan MUI pada mulanya menemukan penolakan oleh para ulama di Indonesia. terdapat tiga peristiwa politik yang sangat krusial sehingga memunculkan penolakan dari kalangan ulama, antara lain:

a. Gagasan pembentukan MUI, menurut para ulama, adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mendapatkan dukungan umat Islam pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1971;
b. Tanda-tanda pemerintah bermaksud mengendalikan umat Islam Indonesia;
c. Dan, adanya kepentingan pemerintah pada saat membuat undang-undang pernikahan pada tahun 1973 yang cenderung merugikan umat Islam, sebab undang-undang yang akan dijadikan aturan tersebut bersifat sekuler (Mahdi & Ayu, 2023).

Dari berbagai problem ketegangan politik tersebut, akhirnya Majelis Ulama Indonesia dapat didirikan pada saat Mukti Ali menjabat sebagai menteri agama. Tepatnya pada 26 Juli 1975 di Jakarta. Seseorang yang ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum MUI pertama kali ialah Dr. Hamka atau yang sering dikenal sebagai Buya Hamka. Periode pertama dimulai pada 1975 hingga 1981. Alasan Buya Hamka menerima posisi tersebut ialah untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah dan umat Islam (Mahdi & Ayu, 2023).

Kendati demikian, perjalanan MUI tidak berjalan sesuai tujuan pembentukannya. Hal tersebut terlihat jelas dalam tesis Muhammad As'ad yang

berjudul *Religion and Politics in Indonesia: Attitudes and Influences of The Indonesian Council of Ulama (MUI) on The General Election* (2010). Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa MUI memiliki instrumen tertentu untuk memberi panduan kepada masyarakat luas, khususnya untuk umat Islam Indonesia. Instrumen atau alat tersebut bersifat legitimatif. Setidaknya terdapat dua jenis alat legitimasi yang dimiliki oleh MUI, yakni fatwa dan wacana (As'ad, 2010). Wacana tersebut terdiri dari rekomendasi, peringatan, instruksi, pernyataan sikap, dan hasil-hasil pemikiran. Sedangkan fatwa memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena fatwa merupakan hasil dari ijtihad hukum yang dilakukan oleh MUI (Baihaqi, 2019).

Posisi fatwa, dalam pandangan masyakat Islam, besifat otoritatif. Sehingga MUI mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab, fatwa berisi pendapat para ulama mengenai hukum. Secara fungsional, fatwa diproduksi oleh para ulama yang berada dalam MUI untuk memberikan pemahaman mengenai doktrin Islam (anjuran dan larangan) (As'ad, 2010). Oleh karena itu, fatwa menjadi indikator bahwa MUI (otoritoritas agama) memiliki kemampuan untuk memberikan arahan kepada umat Islam di Indonesia. Otoritas MUI melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan akan cenderung didengar dan dipatuhi oleh masyarakat Islam di Indonesia (Saputra, 2023).

Bahwa MUI berdiri pada masa Orde Baru (di bawah kekuasaan presiden Soeharto) merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan. Karena, sosio-politik yang terjadi masa itu memberikan gambaran bagaimana relasi MUI dengan negara pada masa Orde Baru. Menurut Muhammad As'ad dalam tesisnya, saat awal pembentukannya, sikap MUI tidak selalu berada dalam kekuasaan negara. Namun, setelah tahun 1982, MUI justru berada di bawah kendali kekuasaan negara. Pernyataan sikap MUI mengenai pemilihan umum (Pemilu) dimulai pada tahun 1977. Pada tahun ini, MUI tidak menyatakan sikap secara eksplisit atau mencolok kepada pemerintah (As'ad, 2010).

Sedangkan pada tahun 1982 hingga 1997, sikap MUI berbeda. Pada tahun-tahun ini, MUI secara jelas mendukung pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga pernyataan MUI pada tahun 1982, 1992, dan 1997 yang menyebutkan nama Soeharto untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai presiden Indonesia. Pada 1987, kendati MUI tidak menyebutkan secara eksplisit pernyataannya, namun wacana yang dihadirkan ialah perlunya melanjutkan pemerintahan Orde Baru dan urgensinya pastisipasi masyarakat Muslim Indonesia dalam pemilihan umum (As'ad, 2010).

Maka, dapat dipahami bahwa, pada masa Orde Baru, sikap politis MUI sangat jelas, yakni berada di bawah kendali pemerintahan Orde Baru. Hanya pada 1977,

MUI tidak menyatakan sikap yang mencolok dalam pemilihan umum. Secara garis besar, pada masa Orde Baru, sikap MUI sebagai organisasi semi pemerintah cenderung berada dalam kekuasaan pemerintah.

4. Analisis Althusser Terhadap Relasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kekuasaan Negara Pada Masa Orde Baru

Telah disinggung di awal, bahwa Althusser memiliki pandangan mengenai ideologi dan aparatusnya; *Ideological State Apparatuses* (ISA) dan *Repressive State Apparatuses* (RSA). Bagi Althusser, ideologi yang dipahami sebagai sebuah kenyataan. Bagaimana ideologi tercipta, sehingga diyakini oleh masyarakat tertentu, meski dengan hal tersebut menciptakan penindasan baru. Dalam konteks ini, ideologi menjadi inti dari kekuasaan politik yang termanifestasi dalam sebuah negara (Wattimena, 2019).

Dalam *Ideology and Ideological State Appratuses* (1971), Althusser menyebutkan bahwa Aparatus Ideologi Negara (ISA) atau alat negara yang bersifat ideologis salah satunya seperti agama (atau institusi agama). Artinya, agama menjadi salah satu instrumen bagi negara untuk memobilisasi, menguasai, dan menghegemoni masyarakat dengan cara yang halus dan kompleks. Sehingga masyarakat bersedia mematuhi segala sesuatu yang menjadi kebijakan negara (Wattimena, 2019). Memang secara intrinsik, agama tidak memiliki tujuan untuk membantu melanggengkan atau melestarikan kekuasaan yang cenderung timpang, namun karena kedekatan agama atau institusi agama dengan kekuasaan, dan sering kali (agama) diperalat oleh kekuasaan untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan impulsif, membuat agama ikut serta dalam pelanggengan kekuasaan.

Bahkan, di berbagai negara, agama dijadikan sebagai kekuatan simbolik untuk mengontrol rakyat. Begitupun di Indonesia. Dalam konteks pembahasan ini, MUI menjadi institusi agama dan pemerintahan pada masa Orde Baru menjadi entitas yang membawa ideologi. Jika ditelisik secara historis, MUI menjadi alat kekuasaan di era Orde Baru pada tahun 1977 hingga 1997. Bagaimana MUI memberikan pernyataan sikap terhadap pemilihan umum pada masa Orde Baru, sehingga posisi MUI berada di bawah kendali pemerintah.

Terlihat bahwa MUI memanfaatkan otoritas keagamaannya dalam bentuk pernyataan yang diterbitkan pada tahun 1982, 1992, dan 1997 (As'ad, 2010). Hal tersebut terjadi karena MUI menjadi alat kekuasaan pemerintah Orde Baru yang bertujuan agar masyarakat Muslim Indonesia mengikuti arahan dari MUI. Melalui wacana yang dihadirkan, MUI mampu memobilisasi masyarakat. Dan, semua itu atas permintaan kekuasaan.

Dalam pandangan Althusser, ISA agama (institusi keagamaan) berjalan melalui proses yang sangat halus atau tanpa represivitas sama sekali. Masyarakat

yang hidup di dalam ideologi tertentu akan merasa bebas, meski sesungguhnya mereka hidup dalam tekanan dan penindasan struktur kekuasaan. Ideologi menginterpelasi masyarakat. Maksudnya, masyarakat tidak sadar bahwa dirinya dikelilingi atau bahkan diatur, dipandu, dan dibimbing oleh ideologi tertentu (Wattimena, 2019).

Posisi MUI dalam hal ini menjadi Aparatus Ideologi Negara (ISA) yang termasuk ke dalam agama. MUI memainkan peranannya sebagai alat kekuasaan Orde Baru pada tahun 1982, 1992, dan 1997. Hal itu dibuktikan dengan adanya pernyataan yang mendukung Soeharto untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai presiden di Indonesia. Dengan adanya pernyataan tersebut, masyarakat Muslim Indonesia tanpa sadar diinterpelasi oleh wacana MUI yang berada di bawah kekuasaan Orde Baru. Mereka akhirnya mengikuti arahan yang menjadi sikap politik MUI.

Sehingga dapat dipahami bahwa, relasi MUI dengan kekuasaan pada masa Orde Baru bersifat politis. Sebab, posisi MUI berada di bawah kekuasaan negara yang berperan untuk melegitimasi setiap kebijakan maupun orientasi politik kekuasaan Orde Baru. Dengan menggunakan otoritas keagamaan Islam, MUI memberikan wacana (bahkan fatwa) yang akhirnya menginterpelasi masyarakat untuk mengikuti kehendak kekuasaan negara pada masa Orde Baru.

D. Simpulan

Agama dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Seperti dua mata uang, agama dan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur, menentukan, dan memberikan wacana bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Hubungan antara agama dan kekuasaan, secara historis, mengalami pasang surut. Hal tersebut disebabkan oleh dinamika sosio-politik yang terjadi dalam masyarakat tertentu.

Seorang filsuf Prancis yang beraliran Marxis, Louis Althusser, memiliki pemikiran yang mampu membedah selubung ideologis dalam kehidupan manusia. Melalui konsep ideologi dan aparatusnya (Aparatus Ideologi Negara dan Aparatus Represif Negara), Althusser memberikan wacana epistemologis yang berusaha mengkritik praktik-praktik politis yang dilakukan oleh kekuasaan. Salah satu praktik politis yang dilakukan oleh kekuasaan ialah, menjadikan agama (atau institusi agama) sebagai alat ideologis.

Di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, dibentuk sebuah lembaga keagamaan yang bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975. Pada mulanaya, institusi agama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan sinergitas masyarakat Muslim dengan pemerintah. Namun, dalam perjalanannya, MUI justru

menggunakan otoritas keagamaannya untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan, dalam hal ini pemerintah di masa Orde Baru. Hal tersebut terbukti dengan adanya pernyataan sikap yang diterbitkan MUI menjelang pemilihan umum pada tahun 1982, 1992, dan 1997.

Jika ditelaah menggunakan pemikiran Althusser, MUI berposisi sebagai alat ideologis negara yang memiliki peran untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan politis. Tidak hanya itu, implikasi wacana yang dihadirkan oleh MUI mengenai pemilihan umum pada masa Orde Baru, akhirnya menginterpelasi masyarakat Islam, khususnya, tanpa mereka sadari. Sebab, proses penanaman ideologi berjalan secara halus dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dalam pandangan masyarakat.

Daftar Rujukan

Althusser, L. (1971). *Ideology and Ideological State Apparatuses: Notes Towards an Investigation (In Lenin and Philosophy, and Other Essays)* (B. Brewster (penerj.)). Monthly Review Press.

Althusser, L. (2015). *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara: Catatan-Catatan Investigasi* (M. Z. Hussein (penerj.)). Indoprogress.

As'ad, M. (2010). *Religion and Politics In Indonesia: Attitudes and Influences of The Indonesian Council of Ulama (MUI) on The General Election*. Leiden University.

Baihaqi, M. (2019). Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam kontestasi Islam Politik Mutakhir. *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, *1*(2).

Bertens, K. (2019). *Filsafat Barat Kontemporer: Prancis*. Gramedia Pustaka Utama.

Fathurokhmah, F. (2018). Ideologi Radikalisme Dalam Islam Tentang Wacana Homoseksual Di Media Massa. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, *3*(2).

Ghazalba, M. A. (2020). Ideologi dan Hegemoni dalam Shalawatan (Study of The Ideology of Althusser and Gramsci's Hegemony). *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, *15*(1).

Johansyah. (2018). Membaca Islam Indonesia di Masa Orde Baru. *Nusantara: Journal of Southeast Asian Islamic Studies*, *14*(1).

Jones, P., Bradbury, L., & Boutillier, S. Le. (2016). *Pengantar Teori-Teori Sosial* (A. F. Saifuddin (ed.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jusuf, R. (2017). *Strukturalisme dan Perkembangannya*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Kosat, O. (2019). Louis Althusser: Marxis Struktural. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi*, *10*(1).

Mahdi, M. F., & Ayu, R. F. (2023). Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama dan Negara. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, *8*(2).

Mubarak, F. (2023). Pemerataan Akses Pendidikan Islam Perspektif Sosiolog: Meta Analisis Pendekatan Emile Durkheim, Max Weber, George Herbert Mead, Louis Althusser, dan Ibnu Khaldun. *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, *5*(1).

Mustofa, M. B., Fauzi, M., Hidayat, R., & Wuryan, S. (2022). Islam Dan Masyarakat Pluralistik Indonesia Dalam Perspektif Dakwah. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, *8*(2).

Ramah, M. (2019). Wacana Dalam Perkembangan Ilmu Sosial Modern. *Kinesik*, *6*(2).

Romadona, M. T. (2020). Louis Althusser dan Filsafat Sebagai Yang Politis. *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, *5*(2).

Rustandi, L. R. (2020). Disrupsi Nilai Keagamaan dalam Dakwah Virtual di Media Sosial Sebagai Komodifikasi Agama di Era Digital. *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, *3*(1).

Rustandi, N., & Wibisono, Y. (2020). Persepsi Keagamaan Masyarakat Terhadap Situs Purbakala Gunung Padang Cianjur. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, *14*(2).

Saputra, I. (2023). Komitmen Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia Dalam Menguatkan Ketahanan Politik Di Indonesia. *Jurnal Pena Islam*, *3*(1).

Suharso, S. P. (2015). *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*. Jember University Press.

Suryajaya, M. (2009). *Imanensi dan Transendensi*. AksiSepihak.

Syaifudin, M. (2019). Agama dan Pengalaman: Pengalaman Mistik dalam Islam. *Prosiding*.

Syawaludin, M. (2017). *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*. NoerFikri.

Wattimena, R. A. (2019). Agama dan Kekuasaan. *The Ary Suta Center*, *46*.

Yunus, F. M. (2019). *Materialisme*. PT Bambu Kuning Utama.

Zed, M. (2008). *Metode Penelitiaan Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.